

## RELASI AKTOR GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA

Ummu Habibah Gaffar<sup>1</sup>

*ummuhabibahgaffar@fisip.upr.ac.id*

Sri Mujiarti Ulfah<sup>2</sup>

*sri.m.ulfa@gmail.com*

### ABSTRACT

The second wave of Covid-19 has hit Indonesia in the last few months. This marks a new chapter for the Covid-19 variant in Indonesia, which is indicated by a very high transmission rate. At the same time, the government is trying to take preventive measures to prevent the spread of Covid-19, one of which is a call for a Covid-19 vaccine. In this regard, this article will look at the relationship between *governance* actors in efforts to prevent Covid-19 in Indonesia, with an emphasis on the involvement of *civil society* and private actors in handling Covid-19 in Indonesia. By using a qualitative method, this article takes a literature study by comparing the results of observations made by observing the development of Covid-19 and the involvement of various actors, especially in terms of preventing Covid-19 such as vaccination. This article concludes that the spread of Covid-19 is still very high, meanwhile the involvement of actors in handling Covid-19 tends to be limited and closed. The actors involved are mostly dominated by the government, while the private sector and *civil society* have not been involved much. This article will contribute at least practically, to be discussed further, especially to formulate a scheme for the involvement of other actors outside the government, while still prioritizing the security and welfare of the community.

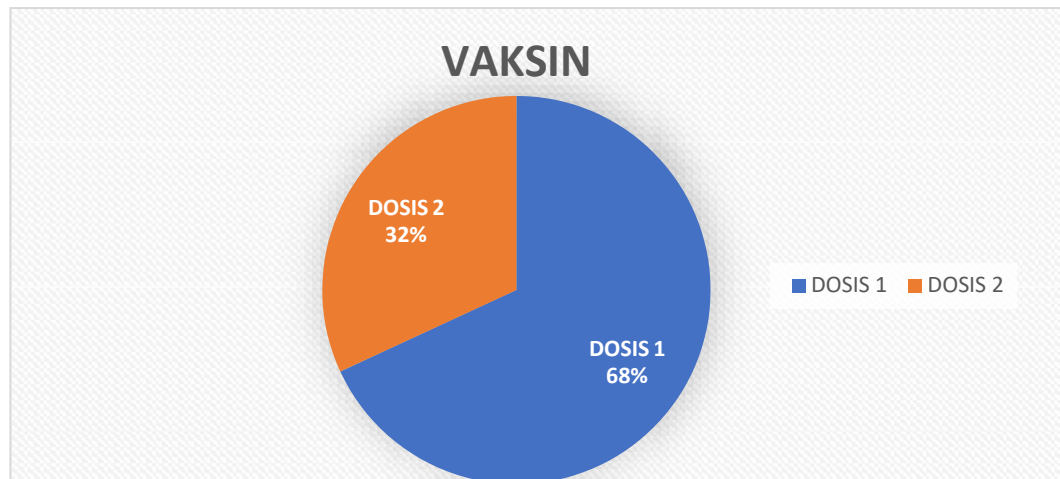
**Keywords:** Covid-19, *Governance*, actor relations.

---

---

### PENDAHULUAN

Covid-19 di Indonesia telah memasuki babak baru. Saat ini oleh pemerintah Indonesia, penanganan Covid-19 telah memasuki fase vaksinasi nasional (Muchtaruddin Mansyur 2021). Kegiatan vaksinasi nasional, sebagai salah satu upaya preventif pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia. Kegiatan vaksinasi setidaknya mulai massif diberlakukan di Indonesia, terutama sejak satu terakhir. Dari data yang telah dirilis oleh Satgas Covid-19, sejauh ini jumlah vaksinasi nasional yang telah dilakukan telah menembus di angka 40.349.049, dengan rincian untuk vaksin dosis pertama sebanyak 28.304.774 atau setara dengan 70.15% dan di angka 13.257.752 atau 32.86% untuk vaksin dosis kedua.

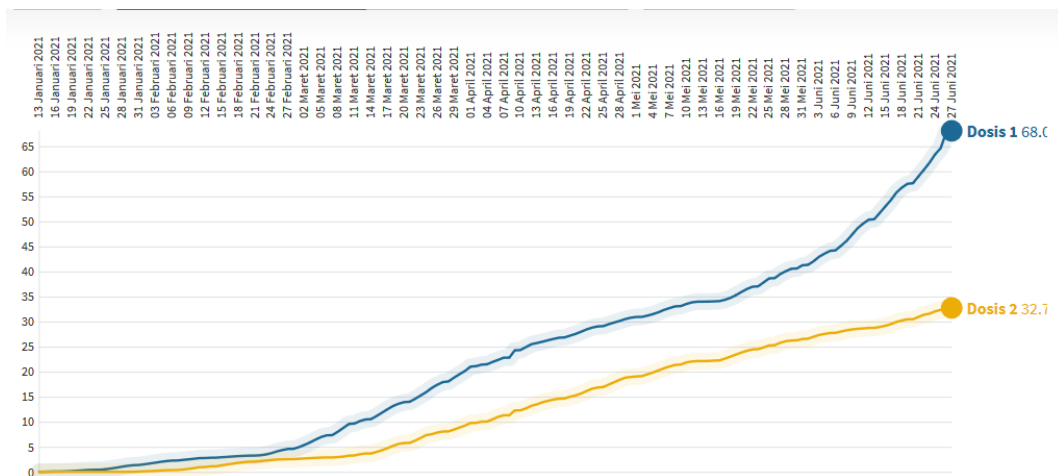


Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada 29 Mei 2021

Secara keseluruhan, angka diatas relatif masih rendah. Mengingat sejak pemerintah menyerukan vaksin, secara keseluruhan masyarakat yang telah melakukan vaksin baru 28.304.774 lebih rendah dari target pemerintah yaitu 181.554.465<sup>1</sup>.

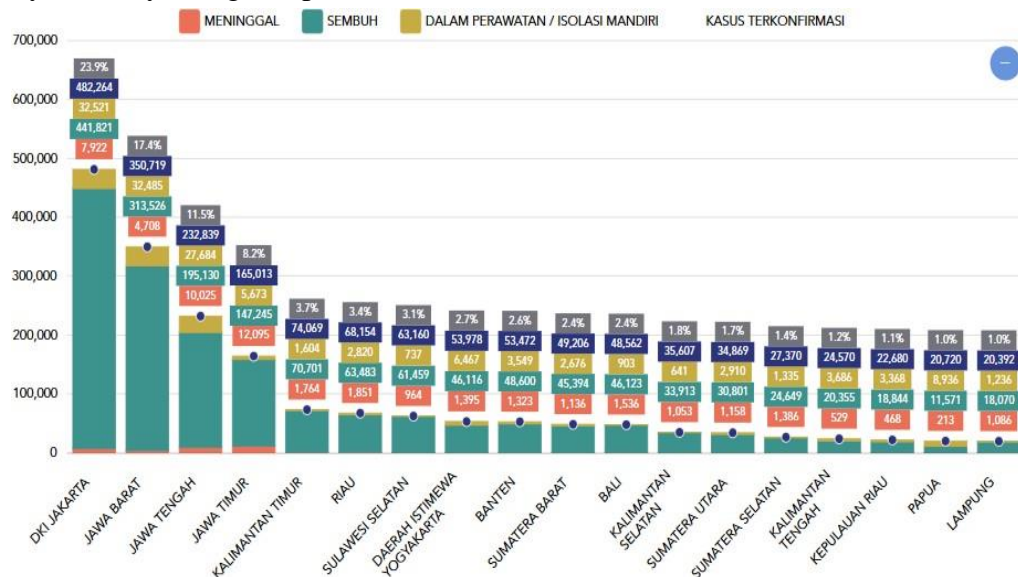
---

<sup>1</sup> <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>, diakses pada 29 Mei 2021



Sumber: <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>, diakses pada 29 Mei 2021

Berbagai usaha pemerintah untuk mendorong vaksinasi nasional sebagai salah satu upaya preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19 perlu di apresiasi. Mengingat, sejauh ini Covid-19 masih menyisahkan banyak persoalan di Indonesia. Apalagi, dengan beberapa waktu belakangan ini dengan adanya Covid-19 varian baru yang di sinyalir jenis Covid-19 varian delta yang penyebarannya sangat cepat, menambah kerumitan penanganan Covid-19 di Indonesia (Rahmansyah et al. 2020; Juaningsih et al. 2020). Hingga saat ini saja, pemerintah Indonesia melalui satgas Covid-19 telah merilis data jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1.677.274 dengan kasus harian menembus diangka 4.000 perharinya. Angka ini sangat mengkhawatirkan, mengingat varian delta disinyalir varian yang proses penyebarannya sangat cepat.



Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada 29 Mei 2021

Selain itu, secara regulatif pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan baik di level pusat hingga ke daerah, dengan tujuan mampu meminimisir penyebaran Covid-19 (Agustino 2020; HS et al. 2020). Meskipun hasilnya belum cukup memuaskan, tetapi paling tidak kita bisa melihat berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memerangi Covid-19 di Indonesia.

Sejumlah studi di Indonesia yang memotret upaya pencegahan Covid-19 telah banyak dilakukan (Rivelino and Ginting 2020; Saraswati 2020; Sarah 2021; Wibowo and Afriyani 2021; Hadiwardoyo 2020; Fauzi 2020; Suhartoyo 2020; Tuwu 2020; Harjudin 2020; Ryan 2020; Khoerunisa and Noorikhshan 2021; Anang Sugeng Cahyono 2021). Mereka pada umumnya melihat bahwa upaya pemerintah dalam memerangi Covid-19 sejauh ini sudah sangat efektif. Para sarjana berkesimpulan seperti ini setelah melihat berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah tentang Covid-19 telah di terbitkan. Sekalipun dalam prakteknya masih banyak lubang yang harus di tambal. Sementara yang lain, banyak yang melihat bahwa tingginya angka Covid-19 di Indonesia, juga tidak lalai dari abainya protokoler kesehatan yang selama ini di terapkan. Protokoler kesehatan hanya sebatas slogan, tidak lebih dari itu. Menurut sebagian sarjana, ini yang membuat angka ledakan Covid-19 di Indonesia semakin besar, khususnya di gelombang kedua.

Sementara studi lainnya melihat Covid-19 semakin tinggi di Indonesia karena adanya inkonsistensi pemerintah. Inkonsistensi ini setidaknya tergambarkan dalam praktek politik keseharian, dimana pada satu sisi pemerintah terus berupaya mengkampanyekan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan dan pertemuan-pertemuan secara langsung yang tidak penting. Sementara di saat bersamaan beberapa oknum pemerintah secara terang-terangan menunjukkan sikap yang justru bertentangan dengan misalnya menghadiri hajatan besar yang mengundang kerumunan banyak orang, membuat acara yang dengan tidak sengaja membuat orang-orang terkonsentrasi pada satu tempat. Meskipun tidak ada unsur kesengajaan, tetapi paling tidak berbagai tindakan ini ikut di aminkan oleh masyarakat umum yang dampak dominonyo pada adanya pembiaran terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, tingginya mobilitas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ikut berkontribusi besar terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satu bukti penyebaran Covid-19 sebagai akibat dari adanya mobilitas adalah varian Covid-19 yaitu Delta, yang sejak beberapa hari belakangan ini membuat repot tenaga kesehatan di Indonesia. Dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi, dengan resiko terpapar yang cukup mudah. Varian ini yang di sinyalir sebagai penyebab terjadinya lonjakan kedua Covid-19 di Indonesia, yang memaksa pemerintah Indonesia kembali memperketat aktifitas sosial di beberapa tempat seperti di Jawa dan Kalimantan.

Sekilas, beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas lebih banyak menyoroti persoalan penyebab Covid-19 di Indonesia. Para sarjana dengan berbagai sudut pandang berhenti pada satu kesimpulan yang sama, bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia begitu tinggi tidak lepas dari beberapa faktor yang ikut berkontribusi pada penularan Covid-19. Karenanya, para peneliti

sebelumnya belum terlalu jauh untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana upaya taktis untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia.

Artikel ini secara khusus akan mengambil sudut yang berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya. Dengan mengisi lubang yang ditinggalkan oleh peneliti terdahulu, artikel ini mencoba mengeksplorasi lebih jauh tentang upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Governance* lebih spesifik pada relasi aktor yang terlibat. Artikel ini ingin memeriksa, sejauh ini penanganan Covid-19 di Indonesia telah melibatkan aktor mana saja dalam *Governance* (Pemerintah, Swasta, *Civil society*), seperti apa perannya dan jika belum dilibatkan apa kendalanya. Artikel ini harapannya dapat berkontribusi setidaknya dalam melengkapi diskusi tentang penanganan Covid-19 di Indonesia dilihat dari keterlibatan aktor *governance*, yang dampak dominonya secara praktis dapat menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Governance*

Kemunculan *Governance* di Indonesia sempat menuai polemik yang berkepanjangan (Rhodes 2007; Pratikno 2007; Wijayanti and Suryani 2015; Chhotray and Stoker 2009; Weiss 2000; Nurlinah, Haryanto 2019). Banyak sarjana terbawa arus pada perdebatan yang sengit dalam melihat konsep *governance*. Pasalnya, sebagian ada yang meletakkan *governance* sebagai konsep politik. Pihak ini beralasan, *Governance* adalah percampuran antara negara, swasta dan *civil society*. Percampuran ini dilihat sebagai interaksi politik antar aktor. Tradisi berfikir ini setidaknya banyak diilhami oleh konsep “elit” dan “aktor”. Tidak heran, pada paham seperti ini *governance* hanya dilihat sebagai arena perebutan kuasa bagi berbagai aktor. Aktor yang kuat akan lebih dominan. Begitu lebih dominan dia akan lebih banyak menguasai arena dalam *governance*, yang wujudnya dapat dilihat dari kebijakan. Secara tidak langsung, pandangan ini melihat bahwa kebijakan sebagai produk politik hanyalah perwujudan secara tidak langsung dari aktor yang dominan. Atau kebijakan sebagai produk politik merupakan perwujudan dari corak dan karakter dari aktor yang dominan.

Sementara yang lain, melihat dengan perspektif yang berbeda. salah satu diantaranya melihat *Governance* sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan ini memiliki perbedaan yang sangat tipis dengan pandangan sebelumnya. Hanya saja yang paling bisa dilihat, bahwa pandangan ini setidaknya menempatkan *governance* sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Kubu ini membangun proposisi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan berlangsung baik ketika prinsip-prinsip pada *governance* dapat direalisasikan. Prasyarat ini dibentuk sekaligus sebagai norma umum yang kira-kira digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asumsinya, jika prinsip-prinsip tersebut di realisasikan maka penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik, yang kemudian hari konsep ini banyak di populerkan dengan istilah “*Good Governance*”.

Berangkat dari dua argumen besar diatas, penulis tidak bermaksud memberikan penilaian yang terlalu dini untuk menghakimi mana diantara kedua

argumen yang benar. Penulis pada konteks ini, melihat jika kedua argumen diatas sama-sama punya kontribusi yang sangat besar. Bagi penulis *governance* sebagai alat analisis, pada satu sisi bisa di tempatkan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tetapi pada sisi yang lain juga bisa dilihat sebagai jejaring aktor yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi swasta dan *civil society*.

Untuk konteks pada penelitian ini, penulis mencoba mengkolaborasikan kedua pendekatan diatas. Dengan melihat bahwa kedua pendekatan sama-sama pentingnya, dan pada kadar tertentu punya kontribusi yang besar terutama sebagai pendekatan dalam melihat fenomena dalam berbagai aspek termasuk dalam hal penanganan Covid-19 di Indonesia. Karena itu, penulis merasa perlu untuk menggunakan pendekatan *Governance* baik sebagai tata kelola maupun *governance* sebagai relasi aktor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang mengadopsi cara kerja metode kualitatif. Dengan pertanyaan penelitian, bagaimana keterlibatan aktor *governance* dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Pertanyaan ini yang akan menjadi pemandu utama dalam riset ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, artikel ini menggunakan pendekatan *governance*. Pendekatan *Governance* di pilih, sebab pendekatan ini dianggap relevan dengan sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang dari segi aktor pelaksanaan melibatkan aktor yang lain, seperti swasta dan *civil society*. Selain itu, konsep ini telah banyak di adopsi sebagai konsep kolaborasi yang pelaksanaannya dilapangan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial berbagi tugas dnegan berbagai aktor, antara *civil society* dan swasta. Sementara itu, penelitian ini akan melihat sejauhmana keterlibatan aktor dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Kedua aspek ini memiliki relevansi yang kuat, antara pertanyaan yang ingin di jawab dengan pendekatan *governance*. Tetapi, perlu dicatat bahwa pendekatan *governance* disini tidak tertuju pada aspek-aspek penyelenggaraan seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Namun, lebih kepada aspek pelaku atau penyelenggaraan. Sehingga artikel ini lebih banyak menaruh perhatian pada relasi aktor alih-alih melihat pada asas pada *governance* itu sendiri.

Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi. Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati perkembangan Covid-19 di Indonesia. Obyek observasi pada pemberitaan resmi yang dirilis oleh pemerintah melalui website resmi <https://covid19.go.id>. Website ini sudah menyajikan berbagai data terkait dengan Covid-19 di Indonesia. Mulai dari alas hukum yang digunakan untuk menyikapi Covid-19, data masyarakat yang terinfeksi, sembuh meninggal serta data tentang hasil vaksinasi baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Peneliti mengamati setiap perkembangan Covid-19 dengan memantau website tersebut, termasuk mengobservasi kebijakan-kebijakan terkait penanganan Covid-19 di berbagai tingkatan. Tujuannya, untuk melihat pihak mana saja yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, sumber dari hasil penelitian berupa jurnal/artikel juga dijadikan sebagai salah satu sumber penunjang dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan

artikel sebagai data tambahan yang akan melengkapi hasil interpretasi penulis terhadap persoalan yang disajikan disini. Artikel dipilih setelah penulis mengumpulkan beberapa artikel dengan tema yang sama dengan penelitian ini dengan kata kunci pencarian “Covid-19”, dan “aktor governance”. Beberapa artikel sangat membantu, khususnya memperdalam analisa penulis terutama dalam melihat relasi aktor pada kaitannya dengan kasus Covid-19 di Indonesia.

Penyajian data dilakukan setelah data hasil observasi di komparasikan dengan beberapa data dari hasil literatur review jurnal/artikel. Kemudian disajikan dengan model naratif analisis. Dalam penyajian ini, penulis menggunakan pendekatan aktor *governance*. Sehingga pembahasan yang disajikan akan lebih banyak melihat proporsional peran aktor *governance* dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan hasil temuan dan penyajian, penulis menggunakan triangulasi sumber untuk melakukan perbandingan hasil penyajian dengan beberapa temuan dan hasil penelitian di tempat lain yang telah dilakukan dengan tema yang sama

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aktor Governance**

Sejumlah studi telah mengungkap begitu banyak keterlibatan aktor selain pemerintah dalam penyelesaian masalah-masalah sosial di Indonesia, termasuk diantaranya untuk persoalan yang belakangan ini di hadapi yaitu Covid-19. Meskipun, dalam studi yang ada terdapat polarisasi yang cukup kental dalam melihat keterlibatan aktor lain selain pemerintah dalam penanganan Covid-19. Polarisasi ini terutama muncul karena satu sisi sebagian sarjana tidak begitu yakin dengan keterlibatan pihak lain selain pemerintah dalam penanganan Covid-19 sementara yang lainnya memiliki argument yang kontras dengan sangat optimis bahwa persoalan Covid-19 di Indonesia setidaknya bisa di tekan dengan melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga sektor lain seperti pihak swasta dan juga *civil society*.

Untuk konteks penelitian ini, tidak ingin larut dalam perdebatan yang terjadi. Kendati demikian, juga tidak ingin membenarkan salah satu dari dua argumen yang silang pendapat. Dengan sudut pandang yang berbeda, artikel ini menemukan bahwa ada relevansi yang menunjukkan kedua argumen diatas pada konteks tertentu dapat dibenarkan. Temuan lapangan melihat, bahwa realisasi penanganan Covid-19 selama ini di Indonesia memang masih di dominasi oleh pemerintah. Pemerintah sebagai aktor yang lebih dominan, saking dominannya aktor yang lain seperti swasta dan *civil society* nyaris tidak terlihat.

Dominasi pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 seperti yang telah diamati oleh penulis tidak terlepas dari urgensi Covid-19 sebagai salah satu hal yang paling mendasar, menyangkut kehidupan orang banyak. Penulis membenarkan bahwa memang di awal-awal Covid-19 peran setral yang dominan pemerintah sangat diperlukan. Paslanya, diawal-awal kemunculan wabah ini, ada begitu banyak informasi yang berseliweran di media sosial. Banyak yang menyangkutpautkan Covid-19 dengan berbagai macam tuduhan. Ada yang menuduh Covid-19 sebagai konspirasi, ada yang melihat Covid-19 hanya sebagai akal-akalan pemerintah. Dan yang paling mengkhawatirkan, diawal-awal

kemunculan Covid-19 banyak yang meragukan bahkan menganggap enteng Covid-19.

Sehingga dari kecamata *governance*, pemerintah harus bersikap tegas. Memerangi setidaknya dua hal, Covid-19 dan penyebaran berita “bohong” mengenai Covid-19. Pada konteks seperti ini, penulis sangat sependapat bahwa peran pemerintah harus tegas. Pemerintah harus lebih dominan ketimbang aktor yang lain, sebab ini menyangkut hajat orang banyak. Yang jika dibiarkan, bukan tidak mungkin persoalan Covid-19 di Indonesia akan semakin sulit untuk di cegah.

Dominasi yang lain pemerintah terhadap aktor yang lain dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dari “Pangkalan Data Covid-19”. Selama ini memang terkesan ada polemik terkait dengan ketersediaan data covid-19 di Indonesia. Beberapa pihak mempersoalkan data covid-19 di Indonesia. Banyak tuduhan yang di alamatkan ke pemerintah, bahwa angka Covid-19 tidak ditampilkan seutuhnya. Tuduhan ini sempat membuat gaduh, soalnya data Covid-19 dianggap terlalu dimonopoli oleh pemerintah. Sehingga tidak ada perbandingan data lain yang bisa dijadikan sebagai pembandingan. Konteks ini bagi penulis, sudah relevan dengan kedudukan dan tugas pemerintah.

Gerakan vaksin yang gencar dilakukan pemerintah sejak beberapa bulan terakhir ini juga banyak di dominasi oleh pemerintah. Realisasi vaksin dilapangan banyak di nahkodai oleh *plat merah*. Keterlibatan pemerintah yang sangat dominan juga tidak bisa disalahkan. Ditengah krisis yang berlangsung, dengan ketersediaan pasokan vaksin yang sangat terbatas. Pemerintah harus turut memastikan bahwa distribusi vaksin harus sampai ditengah-tengah masyarakat. Vaksin harus ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jika pemerintah tidak ikut campur atau tidak dominan dalam mengawal pelaksanaan vaksin di Indonesia, maka kecenderungan vaksin bisa di salah gunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Selain pemerintah, kami juga melihat bahwa aktor yang lain memiliki keterlibatan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Meskipun perannya seringkali tidak terlihat, namun memiliki dampak yang sangat signifikan. Salah satu misalnya, bisa dilihat dari keterlibatan paguyuban atau kelompok masyarakat seperti yang berlangsung di beberapa tempat diantaranya Sambatan Jogja (Sonjo) di Jogjakarta. Sonjo, sebagai kelompok dan komunitas yang hadir untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Kami melihat, solidaritas yang terbangun dari masyarakat ditengah Covid-19 sebagai bentuk dan keterlibatan *civil society*.

Di media sosial juga pernah di hebohkan dengan banyaknya postingan viral yang berasal dari beberapa masyarakat. Banyak postingan yang menunjukkan masyarakat menawarkan bantuan berupa makanan kepada sesama masyarakat yang membutuhkan. Meskipun cara ini berbeda dengan lumbung pangan, dalam hal keterlibatan masyarakat dilakukan secara spontan dan sukarela tanpa ada koordinasi. Namun, cara-cara seperti dapat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan *civil society* dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

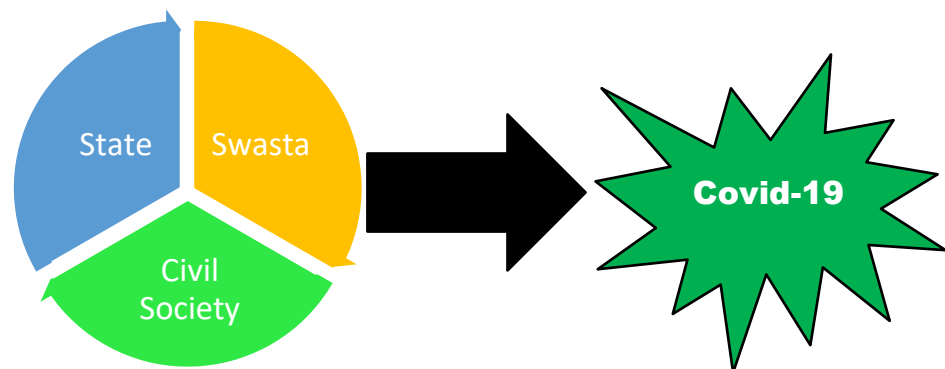




Sumber: <https://news.detik.com/foto-news/d-5225617/gratis-sembako-ini-digantung-untuk-bantu-warga-terdampak-covid-19>

Selain kedua aktor yang telah disebutkan diatas, aktor ketiga yaitu swasta juga punya peran yang cukup signifikan dalam upaya penanganan Covid-19. Seperti halnya dengan *civil society*, aktor ini jarang sekali dilihat, padahal memberikan kontribusi yang cukup besar. Salah satu keterlibatan aktor swasta yang penulis amati dalam penanganan Covid-19 misalnya ikut menunjang kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti untuk pemberlakuan jam malam dan pembatasan kegiatan pada tempat-tempat makan/minum serta tempat hiburan. Keterlibatan pihak swasta dengan ikut memberlakukan kebijakan tersebut meskipun tidak banyak disorot tetapi memiliki implikasi yang besar. Dalam kecamata kebijakan, kebijakan yang bagus sekalipun jika tidak ditunjang oleh realisasi dan pelaksanaan di lapangan hasilnya tidak akan maksimal. Untuk konteks penanganan Covid-19 dengan melibatkan pihak swasta dapat di pandang sebagai kontribusi aktor lain selain pemerintah untuk memerangi Covid-19.

Secara keseluruhan, sejauh ini pengamatan yang kami lakukan menunjukkan jika keterlibatan aktor *governance* yang berlangsung dalam penanganan Covid-19 di Indonesia cukup baik. Meskipun dari hasil observasi kami, aktor pemerintah memiliki peran yang paling dominan dalam penanganan Covid-19. Ilustrasi keterlibatan berbagai aktor dalam memerangi Covid-19 dapat di lihat dari skema berikut ini:



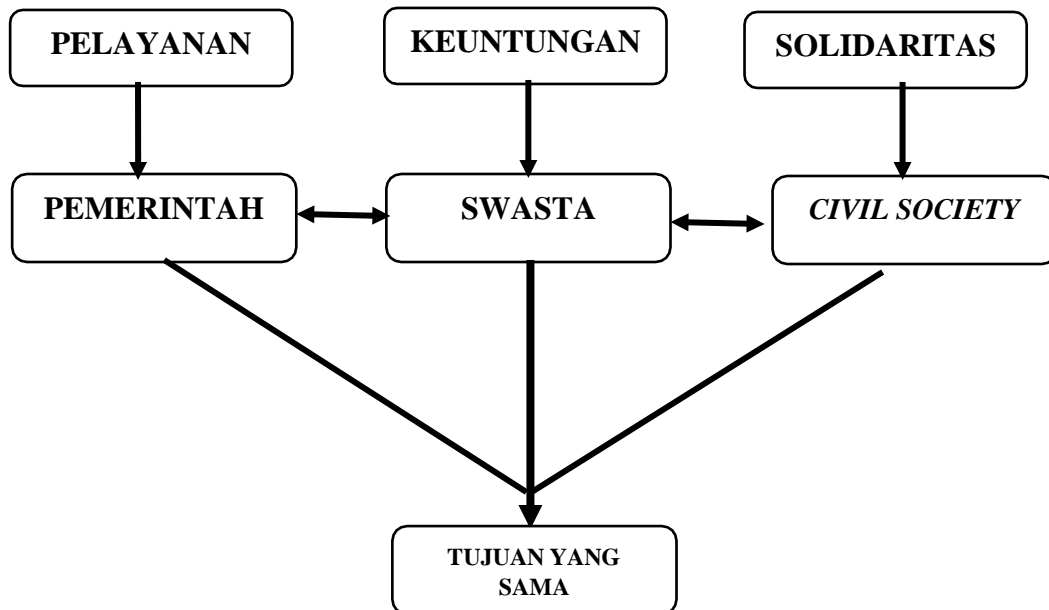
### **Relasi Aktor Governance dalam Penanganan Covid-19: Motifnya/Orientasinya berbeda**

Seperti yang telah di bahas sebelumnya, aktor yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia cukup beragam. Setidaknya dari pengamatan yang kami lakukan ada tiga aktor yang saling beririsan mereka adalah pemerintah, swasta dan *civil society*. Hal ini sangat menarik, pasalnya kami melihat ketiga aktor ini dipersatukan oleh satu persoalan yang sama padahal ketiganya memiliki prinsip dasar yang berbeda. Namun, itu tidak menjadi penghalang. Justru ketiga aktor tersebut mampu bersinergi meskipun dengan motif pendorong yang beragama.

Pemerintah sebagai salah satu aktor *governance* yang terlibat pada penanganan Covid-19 di Indonesia. Perlu dicatat, peran pemerintah sangat signifikan. Jika ditelusuri dari motif atau dorongan pemerintah untuk terlibat lebih jauh pada penanganan Covid-19, maka sudah jelas bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Pemerintah harus hadir untuk memberikan pelayanan dan jaminan keamanan kepada masyarakat. Termasuk pada konteks untuk penanganan Covid-19, pemerintah disini didorong oleh tanggung jawab moral. Sehingga tidak terlalu mengherankan jika diantara aktor *governance* yang terlibat pemerintah lebih dominan ketimbang dengan aktor yang lainnya.

Sementara untuk *civil society*, jika melihat dari keterlibatan *civil society* dalam penanganan Covid-19 sejauh ini juga sangat berkontribusi. Terlepas dari banyaknya kritik yang dialamatkan bahwa tingginya Covid-19 akibat lalainya protokoler Kesehatan yang terjadi. Namun, disini menurut hemat penulis *civil society* seperti yang sudah disinggung sebelumnya juga punya kontribusi yang besar dalam penanganan Covid-19. Keterlibatan *civil society* setidaknya bisa dilihat dengan menelusuri motif atau dorongan yang membuat dia bergerak secara kolektif. Hasil observasi penulis, melihat bahwa *civil society* digerakan oleh tingginya rasa solidaritas terhadap sesama. Nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan menjadi pendorong bagi kelompok *civil society* dalam memerangi Covid-19 meskipun dengan arena yang berbeda dengan pemerintah. Jika pemerintah lebih banyak pada aspek normatif kelompok *civil society* mengambil posisi pada penguatan jejaring di akar rumput. Saling membantu, menyemangati sebagai praktik keseharian *civil society* dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Untuk swasta, dapat dilihat bahwa keterlibatan mereka pada penanganan Covid-19 juga tidak bisa diabaikan. Pihak swasta meskipun tidak sedominan pemerintah tetapi implementasinya dilapangan sangat membantu terutama dalam merealisasikan peraturan-peraturan pemerintah, seperti pada pembatasan aktifitas malam atau pemberlakuan pembatasan skala sosial pada daerah-daerah tertentu. Terlepas dari itu, penulis melihat jika motif dan dorongan aktor swasta terutama dalam kecamatan *governance* sedikit berbeda dari dua aktor sebelumnya. Aktor swasta lebih banyak di dorong oleh motif keuntungan. Atau dalam hal ini, lebih kepada kepentingan ekonomis.



Gambar Dorongan dan Motif Aktor Governance

Jika melihat ketiga motif dari aktor yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia dapat dikatakan bahwa motif mereka sebenarnya berbeda-beda. Menariknya, perbedaan yang ada tidak membuat ketiga aktor untuk saling berkonflik. Malah sebaliknya, para aktor terlibat bersama. Saling bersinergi memerangi Covid-19 di Indonesia dengan caranya masing-masing. Hal ini oleh penulis melihatnya karena adanya kepentingan yang sama. Ketiga aktor dalam *governance* meskipun berangkat dari motif atau dorongan yang berbeda, mereka pada akhirnya dipersatukan oleh satu kesamaan, yaitu ketiga-ketiga sama-sama ingin memerangi dan berupaya menekan penyebaran Covid-19. Irisan ini yang pada akhirnya membuat relasi pada aktor *governance* dalam penanganan Covid-19 tidak menimbulkan konflik.

## KESIMPULAN

Gelombang kedua Covid-19 telah melanda Indonesia. Bencana ini hadir justru di tengah-tengah pemerintah gencar melakukan upaya preventif dengan gerakan vaksinasi nasional. Vaksinasi nasional dipercaya sebagai salah satu solusi yang akan mempersempit penyebaran Covid-19 di Indonesia. Langkah ini meskipun menuai banyak kritik tetap perlu diapresiasi. Pemerintah dengan segala sumber daya telah melakukan yang terbaik, vaksinasi nasional salah satu wujud konkret penanganan terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Sama seperti tempat lain dibelahan dunia lainnya. Memilih vaksinasi sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. Sembari, tetap mengoptimalkan upaya preventif dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan.

Di Indonesia, upaya melawan Covid-19 terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun aktor yang lain. Penelitian ini menyimpulkan, sejauh ini penanganan Covid-19 tidak hanya melibatkan pemerintah. Namun, telah melibatkan banyak aktor, *civil society* dan swasta sebagai aktor yang melengkapi

peran pemerintah. Kedua aktor ini, meskipun tidak terlalu dominan tetapi perannya cukup signifikan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. *Civil society*, mengambil peran yang cukup setral. Membangun solidaritas dan kebersamaan untuk saling membantu antar masyarakat terdampak Covid-19. Sementara aktor lainnya swasta, ikut merealisasikan kebijakan pemerintah diantaranya dengan mengimplementasikan pemberlakuan pembatasan aktifitas jam operasional kantor.

Terakhir, perlu dicatat bahwa yang menarik dari temuan ini karena berbagai aktor yang terlibat dalam penanganan Covid-19 justru berangkat dari motif dan dorongan yang berbeda. tetapi, ketiga aktor masih bisa bersinergi. Tidak menimbulkan konflik sebagaimana yang banyak dilihat di tempat lain bahwa pertemuan antara berbagai aktor justru akan membuat konflik terbuka semakin besar. Alih-alih mencapai kesepakatan yang sama justru keberadaan berbagai aktor dengan motif yang berbeda dapat memicu konflik. Kebalikan dari temuan ini, justru temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan motif dan dorongan yang ada pada masing-masing aktor tidak menimbulkan potensi konflik. Malahan, yang kami lihat ada kesamaan yang terbangun antara ketiga aktor tersebut. Persamaan yang menjadi irisan yang mengeliminasi konflik tersebut karena adanya tujuan bersama yang ingin di wujudkan, yaitu melawan penyebaran *Covid-19* di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator* 16 (2): 253–70. <https://doi.org/10.24258/Jba.V16i2.685>.
- Anang Sugeng Cahyono. 2021. "Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19." *Jurnal Publiciana* 13 (1): 83–88. <https://doi.org/10.36563/P.V13i1.207>.
- Chhotray, Vasudha, And Gerry Stoker. 2009. "Governance: From Theory To Practice." *Governance Theory And Practice*, 214–47. [https://doi.org/10.1057/9780230583344\\_10](https://doi.org/10.1057/9780230583344_10).
- Fauzi, Ahmad. 2020. "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Penanganan Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16 (1): 174–78.
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal Of Business And Entrepreneurship* 2 (2): 83–92. <https://doi.org/10.24853/Baskara.2.2.83-92>.
- Harjudin, Laode Ode. 2020. "Dilema Penanganan Covid-19: Antara Legitimasi Pemerintah Dan Kepatuhan Masyarakat." *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* 1 (1): 90. <https://doi.org/10.52423/Jkps.V1i1.13249>.
- Hs, Heri Kurniawansyah, Amrullah, S Salahuddin, Muslim, And Sri Nurhidayati. 2020. "Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia Heri." *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*, 1 (2): 130–39. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/117>.
- Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, And Dzakwan Nurirfan. 2020. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan

- Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7 (6): 509–18. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V7i6.15363>.
- Khoerunisa, Nisa, And Faisal Fadilla Noorikhshan. 2021. “Perbandingan Tata Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia Dan India.” *Journal Of Political Issues* 2 (2): 89–101. <https://doi.org/10.33019/Jpi.V2i2.36>.
- Muchtaruddin Mansyur. 2021. “Vaksinasi Covid-19 Bagi Pekerja, Harapan Pulihnya Produktivitas.” *Journal Of The Indonesian Medical Association* 71 (1): 1–4. <https://doi.org/10.47830/Jinma-Vol.71.1-2021-534>.
- Nurlinah, Haryanto, Sunardi. 2019. “Jurnal Ilmu Sosial Disparity Between E - Government And Human Resources” 18 (1): 17–34. <https://doi.org/10.14710/Jis.18.1.2019.17>.
- Pratikno. 2007. “Governance Dan Krisis Teori Organisasi.” *Jkap* Vol 11, No: 121–38.
- Rahmansyah, Wildan, Resi Ariyasa Qadri, Rts Ressa Anggia Sakti, And Syaiful Ikhsan. 2020. “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 1 (4): 159–166.
- Rhodes, R. A.W. 2007. “Understanding Governance: Ten Years On.” *Organization Studies* 28 (8): 1243–64. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>.
- Rivelino, Rivelino, And Arwanto Harimas Ginting. 2020. “Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid - 19 Dki Jakarta.” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13 (1): 36–51. <https://doi.org/10.33701/Jppdp.V13i1.1027>.
- Ryan, Jacko. 2020. “Peranan Jaringan Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Indonesia.” *Journal Publicuho* 3 (4): 491. <https://doi.org/10.35817/Jpu.V3i4.15380>.
- Sarah, Ayu. 2021. “Kualitas Pelayanan Publik Pada Administrasi Kependudukan Di Bidang Pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-Ktp).” *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 7 (2): 1–10. <https://doi.org/10.37304/Jispar.V7i2.2192>.
- Saraswati, Putu Sekarwangi. 2020. “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesiasaraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 147–152. <https://doi.org/10.22225/Kw.14.2.1923.147-152>.” *Kertha Wicaksana* 14 (2): 147–52.
- Suhartoyo. 2020. “Governance Services Against Pandemic Covid 19 As A Form Of Good Governance.” *Administrative Law & Governance Journal* 3 (4): 708–18. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9660/0>.
- Tuwu, Darmin. 2020. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” *Journal Publicuho* 3 (2): 267. <https://doi.org/10.35817/Jpu.V3i2.12535>.
- Weiss, Thomas G. 2000. “Governance, Good Governance And Global Governance: Conceptual And Actual Challenges.” *Third World Quarterly* 21 (5): 795–814. <https://doi.org/10.1080/713701075>.
- Wibowo, Muhammad Taufiq Hatta, And Ami Afriyani. 2021. “Strategi

Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 12: 1–14.

Wijayanti, Dyah Retno, And Sri Suryani. 2015. “Waste Bank As Community-Based Environmental Governance: A Lesson Learned From Surabaya.” *Procedia - Social And Behavioral Sciences* 184 (August 2014): 171–79. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.077>.